



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan : 1. Kapolri
2. Kejaksaan Agung
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Waktu : 14.22 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Penjelasan Pemerintah tentang Kebijakan dan situasi keamanan dan penegakan hukum di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus.
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 18 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 10 hadir fisik
- 6 hadir virtual
- 2 izin
2. Pemerintah:
a. Wakapolri (Komjen Pol. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si
b. Kabaintelkam (Komjen Pol. Paulus Waterpaw)
c. Asos Kapolri (Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si)
d. Kadensus 88 AT Polri (Irjen Pol. Marthinus Hukom, S.I.K)
e. Wakil Jaksa Agung RI (Setia Untung Arimuladi)
3. DPR RI
- H. Fachrul Razi, M.I.P.

PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus menerima Penjelasan Pemerintah tentang Kebijakan dan situasi keamanan dan penegakan hukum di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus.
2. Pansus DPR RI juga menerima masukan dari Dewan Perwakilan Daerah RI.
3. Pansus DPR RI mendorong kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk terus meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka penegakan hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Pansus DPR RI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang PON dan PESPARAWI tahun 2021.
5. Pansus DPR RI mendorong kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan deteksi dini terhadap gangguan keamanan sehingga dapat meminimalisir dampak pendekatan keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
6. Pansus DPR RI mendorong kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat.
7. Pansus DPR RI mendorong kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan upaya penegakan HAM untuk mendukung keberlangsungan pembangunan Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
8. Pansus DPR RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi agar dana otonomi khusus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

KETUA PANSUS



KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.
A.263